



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan paling kurang 1 (satu) tahun, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat daerah berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, yang telah membatalkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu meniadakan pengelolaan dan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian di bidang pendidikan dasar serta bidang pendidikan menengah dan tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, serta untuk menyeimbangkan beban kerja pada tiap bidang dan seksi, perlu dilakukan perubahan nomenklatur bidang dan seksi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 55), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) mengenai Bagan Struktur Organisasi Dinas, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 6 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, diubah sebagai berikut :

#### Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1) Subbagian Perencanaan dan Program;
  - 2) Subbagian Keuangan; dan
  - 3) Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
  - 1) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
  - 2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 dan
  - 3) Seksi Pembinaan Sekolah Swasta.
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan:
  - 1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
  - 2) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - 3) Seksi Pembinaan Sekolah Swasta dan Kerjasama Pendidikan Tinggi.

- e. Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, membawahkan :
    - 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus;
    - 2) Seksi Alat Bantu Media Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
    - 3) Seksi Ketenagaan Pendidikan Khusus.
  - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, membawahkan:
    - 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
    - 3) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
3. Ketentuan Pasal 8 Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, diubah sebagai berikut:

#### Pasal 8

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan :
    - 1. Subbagian Umum;
    - 2. Subbagian Kepegawaian;
    - 3. Subbagian Perlengkapan; dan
    - 4. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan :
    - 1. Seksi Regulasi dan Kerjasama;
    - 2. Seksi Analisa dan Inovasi Potensi Daerah; dan
    - 3. Seksi Penyusunan dan Pengembangan Kinerja.
  - d. Bidang Pendapatan I, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Pendapatan;
    - 2. Seksi Sengketa Pajak; dan
    - 3. Seksi Pembukuan dan Piutang Pendapatan.
  - e. Bidang Pendapatan II, membawahkan :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber I;
    - 2. Seksi Pendataan dan Penerimaan Sumber II; dan
    - 3. Seksi Evaluasi Pendapatan II.
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan :
    - 1. Seksi Pembinaan dan Kepatuhan;
    - 2. Seksi Pengendalian dan Pemutakhiran; dan
    - 3. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan Pasal 34a, sebagai berikut :

### Pasal 34a

Hal-hal yang menyangkut penempatan para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, paling lama akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Januari 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR 2 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

I. UMUM

Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakekatnya menyelenggarakan urusan Pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Seperti halnya perubahan pada Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang meniadakan pengelolaan dan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu melakukan perubahan atas nomenklatur Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, serta untuk menyeimbangkan beban kerja pada tiap Bidang dan Seksi, perlu dilakukan perubahan nomenklatur Bidang dan Seksi pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- Angka 1  
 Cukup Jelas
- Angka 2  
 Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 34a

Ketentuan ini untuk menghindari adanya stagnasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 162